

PERAN PERPUSTAKAAN DALAM MENUNJANG PENCITRAAN LEMBAGA

Darmono

Universitas Negeri Malang (UM)

e-mail: darmonoum@gmail.com

Abstrak

Perpustakaan instansi pemerintah adalah perpustakaan yang berada di instansi khusus disebut dengan perpustakaan khusus. Demikian juga perpustakaan yang berada di lingkungan Badan Pengawas Keuangan (BPK) adalah perpustakaan khusus. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perpustakaan khusus berbeda dengan jenis perpustakaan yang lainnya. Perpustakaan khusus diatur dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) 7496 – 2009 yaitu tentang Perpustakaan Khusus Instansi Pemerintah. Sesuai dengan SNI 7496 – 2009 pengertian perpustakaan khusus adalah “institusi/unit kerja pengelola karya tulis, karya cetak, dan karya rekam yang dikelola secara profesional berdasarkan sistem yang baku untuk mendukung kelancaran/keberhasilan pencapaian visi, misi, dan tujuan instansi induk yang menaunginya. Jika perpustakaan dikelola dengan baik, perpustakaan dapat menunjang pencitraan dari lembaga induknya, dan akhirnya dapat meningkatkan reputasi lembaga induk. Dalam rangka membangun citra perpustakaan dalam rangka mendukung reputasi lembaga induknya dalam hal ini adalah BPK sebaiknya perpustakaan mengembangkan program kerja sebagai berikut: (1) menyelenggarakan otomasi, (2) melaksanakan digitalisasi dokumen lembaga induk, (3) menyajikan layanan koleksi digital, (4) mengembangkan Web secara dinamis, (5) menyelenggarakan layanan prima, (6) mengembangkan jaringan, (7) menyediakan akses informasi secara lokal, nasional, regional, dan global.

Makalah disampaikan pada Seminar “Peran Perpustakaan dalam Meningkatkan Reputasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia” Di Hotel Santika Jakarta – Tgl 26 Juni 2012